

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Entitas sektor publik ataupun sektor privat sama-sama menerapkan praktik akuntansi. Namun, entitas sektor publik menggunakan mekanisme akuntansi yang diterapkan pada praktik-praktik organisasi publik. Akuntansi sektor publik memiliki yurisdiksi atas lembaga pemerintah yang lebih tinggi dan subdivisi mereka, seperti pada pemerintah daerah, yayasan, partai politik, dan organisasi nirlaba lainnya (Kristiyani dan Hamidah, 2020). Sementara itu, Biduri (2018) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan.

Menurut Mardiasmo (2018), akuntansi sektor publik erat kaitannya dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik yang memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dari sektor swasta disebabkan oleh berbagai faktor selain faktor ekonomi, diantaranya faktor politik, sosial, budaya, dan juga historis. Secara karakteristik, sektor publik memiliki karakteristik yang bermotif nirlaba dengan akuntabilitas terhadap publik (Choirudin, 2018). Sumber pendanaan dari entitas sektor publik tidak berasal dari pembiayaan internal seperti laba ditahan dan modal sendiri. Melainkan, sumber pendanaannya berasal dari pajak, retribusi, sumbangan, hingga hibah. Dengan demikian karakteristik anggaran entitas menjadi terbuka untuk publik. Selain itu, struktur organisasi entitas publik bersifat birokratis dan kaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan praktik akuntansi yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap dana yang dipercayakan publik untuk dikelola oleh suatu entitas tertentu

tanpa terdapat motivasi untuk memperoleh keuntungan material dari operasional entitas.

2.1.2 Organisasi Nirlaba Keagamaan

Organisasi nirlaba meliputi organisasi keagamaan, organisasi jasa sukarelawan, sekolah negeri, hingga rumah sakit (Pramesti et al., 2018). Organisasi nirlaba ini bukanlah organisasi yang berorientasi pada keuntungan. Organisasi nirlaba memerlukan pelaporan keuangan sebagai bentuk tanggungjawab atas kegiatannya dalam suatu periode (Dinanti dan Nugraha, 2018). Faktor kultural yang mempengaruhi sektor publik membentuk organisasi nirlaba keagamaan.

Organisasi nirlaba keagamaan didefinisikan pada organisasi yang berfokus pada aktivitas dari agama tertentu. Organisasi nirlaba keagamaan merujuk kepada organisasi di dalam masjid, gereja, kuil, pura, vihara, ataupun organisasi di luar itu yang kegiatannya terlibat ke dalam kegiatan keagamaan (Rengku dan Lintong, 2022). Organisasi nirlaba keagamaan memerlukan informasi akuntansi sebagai akuntabilitas dari sumbangan yang telah diterima dari berbagai pihak. Sebab, meskipun sebagai organisasi keagamaan, organisasi tersebut tetap memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan secara profesional sesuai dengan standar yang berlaku.

2.1.3 Konsep Dasar ISAK 35

Penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 semenjak tahun 1997 yang kemudian diperbaharui dengan adanya Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 yang berlaku efektif pada tahun 2020. Secara umum perbedaan dari PSAK 45 dan ISAK 35 terletak pada klasifikasi aset neto. Dimana dalam PSAK 45 diklasifikasikan ke dalam pos aset neto tidak terikat, terikat permanen, dan tidak terikat permanen. Sedangkan dalam ISAK 35 aset neto dibagi menjadi aset neto dengan dan tanpa pembatas (Afridayani et al., 2022).

Ruang lingkup ISAK 35 mencakup penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba sebagai interpretasi dari PSAK 1, yakni penyajian laporan keuangan. PSAK 1 secara terminologi diterapkan utuh untuk entitas berorientasi

laba, sedangkan entitas non laba memerlukan penyesuaian deskripsi. Maka penyajian laporan keuangan entitas nonlaba didasarkan pada ISAK 35. Interpretasi ini diterapkan untuk entitas berorientasi non laba terlepas dari apapun bentuk badan hukum entitas tersebut. Implementasi interpretasi dilakukan juga oleh entitas berorientasi nonlaba yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

2.1.4 Laporan Keuangan Pada Entitas Berorientasi Nonlaba

Entitas berorientasi nonlaba (nirlaba) adalah organisasi yang tidak bertujuan mencari keuntungan. Organisasi nirlaba ini biasanya didirikan atau dikelola oleh sektor swasta. Dana yang di himpun oleh organisasi nirlaba biasanya berasal dari para donatur yang tidak mengharapkan keuntungan dana yang diberikan. Entitas berorientasi nonlaba pada umumnya memilih pemimpi, pengurus atau penanggungjawab yang menerima amanat dari para stakeholdernya.

Maraknya kasus bahwa pengelola entitas berorientasi nonlaba terutama dalam hal sebuah kepercayaan (agama) tidak amanah dalam pengelolaan keuangan. Terlebih lagi Entitas Berorientasi Nonlaba jenis ini umumnya hanya berfokus pada pelaksanaan program daripada mengurus administrasi. Namun hal ini tidak bisa dijadikan alasan, karena organisasi nirlaba tidak bisa hanya mengandalkan kepercayaan dari donaturnya. Entitas Berorientasi Nonlaba juga tidak luput untuk dapat mengalami defisit. Namun, jika organisasi nirlaba memperoleh surplus, surplus tersebut akan digunakan kembali untuk memenuhi kepentingan publik.

2.1.5 Laporan Keuangan Dalam ISAK 35

Menurut PSAK 1 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Selain itu, laporan keuangan ini juga merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi. Tujuan dari laporan keuangan adalah guna memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Tujuan dari laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Berdasarkan ISAK 35 yang mengatur tentang penyajian laporan

keuangan entitas berorientasi non laba, laporan keuangan yang dimaksudkan terdiri dari:

2.1.5.1 Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan memproyeksikan nilai aset, kewajiban, dan informasi mengenai hubungan unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu guna mengungkap dan memberikan informasi yang dapat membantu para donatur, anggota entitas nonlaba, pihak kreditur, serta pihak lain yang berkepentingan. Baik dalam menilai kemampuan entitas untuk memberikan jasa berkelanjutan, hingga menilai fleksibilitas dan likuiditas keuangan.

2.1.5.1.1 Aset

Aset didefinisikan sebagai sumber daya yang dikuasai oleh suatu entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan sebagaimana manfaat ekonomi yang diharapkan di masa mendatang (Diviana et al., 2020). Secara umum, entitas menyajikan dan mengumpulkan aset kedalam kelompok secara homogen. Seperti berikut ini:

- a. Kas dan setara kas.
- b. Piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa lain.
- c. Persediaan.
- d. Sewa, asuransi, dan jasa lain yang dibayar dimuka.
- e. Instrumen keuangan dan investasi jangka Panjang.
- f. Tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap lain yang digunakan untuk menghasilkan barang jasa.

2.1.5.1.2 Liabilitas

Liabilitas dapat didefinisikan sebagai klaim atau pengakuan dari pihak ketiga atas aset entitas. Liabilitas disajikan berdasarkan urutan jatuh tempo dari yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun digolongkan kewajiban lancar, selanjutnya kewajiban yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun digolongkan sebagai kewajiban jangka panjang. Berikut merupakan urutan penyajian liabilitas/kewajiban.

- a. Utang Usaha,
- b. Pendapatan Diterima Dimuka
- c. Utang Lainnya (seperti utang beban)

d. Utang Jangka Panjang

2.1.5.1.3 Aset Neto

Aset neto merupakan selisih dari nilai aset dengan kewajiban entitas. Dalam laporan keuangan entitas berorientasi laba aset neto dikenal sebagai ekuitas pemilik. Dalam ISAK 35 Aset neto diklasifikasikan menjadi dua, yakni:

a. Aset Neto Tanpa Pembatas (*without restrictions*)

Aset neto tanpa pembatasan merupakan aset neto yang tidak memiliki batasan terhadap aset tersebut. Sebagai contohnya, sumbangan yang diberikan oleh seorang donatur, dimana donatur tidak secara jelas mencantumkan jangka waktu dari pemberian donasinya. Sehingga pemasukan dan pengeluaran yang berhubungan dengan entitas dapat mempergunakannya untuk kebutuhan entitas.

b. Aset Neto Dengan Pembatas (*without restrictions*)

Aset neto dengan pembatasan merupakan pengabungan antara klasifikasi aset neto terikat permanen dan aset neto terikat temporer yang dimaksud dalam PSAK 45. Aset neto dengan pembatasan merupakan aset neto yang berhubungan dengan sumber daya berupa aktivitas operasi tertentu, investasi untuk jangka waktu tertentu, serta aset neto yang digunakan untuk selamanya, seperti tanah dan bangunan yang diberikan untuk tujuan tertentu, sehingga pemasukan dan pengeluarannya itu diluar entitas seperti kas anak yatim, kas fakir miskin dan lain lain.

Berikut merupakan contoh format dari Laporan Posisi Keuangan Entitas Nirlaba yang terdiri dari dua format, yakni:

a. Format A, menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Namun, jika penghasilan komprehensif lain bersumber dari aset neto dengan pembatasan, maka entitas wajib menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya.

b. Format B, dimana format ini tidak menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri.

Gambar 2. 1
Bentuk Laporan Posisi Keuangan A

ENTITAS XYZ		
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
ASET		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	xxxx	xxxx
Piutang bunga	xxxx	xxxx
Investasi jangka pendek	xxxx	xxxx
Aset lancar lain	xxxx	xxxx
Total Aset Lancar	xxxx	xxxx
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti investasi	xxxx	xxxx
Investasi jangka panjang	xxxx	xxxx
Aset tetap	xxxx	xxxx
Total Aset Tidak Lancar	xxxx	xxxx
TOTAL ASET	xxxx	xxxx
LIABILITAS		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Pendapatan diterima di muka	xxxx	xxxx
Utang jangka pendek	xxxx	xxxx
Total Liabilitas Jangka Pendek	xxxx	xxxx
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Utang jangka panjang	xxxx	xxxx
Liabilitas imbalan kerja	xxxx	xxxx
Total Liabilitas Jangka Panjang	xxxx	xxxx
Total Liabilitas	xxxx	xxxx
ASET NETO		
<i>Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya**</i>	xxxx	xxxx
<i>Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)</i>	xxxx	xxxx
Total Aset Neto	xxxx	xxxx
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	xxxx	xxxx

(B)

Sumber: DE ISAK 35 IAI, tahun 2018

Gambar 2. 2
Bentuk Laporan Posisi Keuangan B

ENTITAS XYZ		
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
ASET		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	XXXX	XXXX
Piutang bunga	XXXX	XXXX
Investasi jangka pendek	XXXX	XXXX
Aset lancar lain	XXXX	XXXX
Total Aset Lancar	XXXX	XXXX
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti investasi	XXXX	XXXX
Investasi jangka panjang	XXXX	XXXX
Aset tetap	XXXX	XXXX
Total Aset Tidak Lancar	XXXX	XXXX
TOTAL ASET	XXXX	XXXX
LIABILITAS		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Pendapatan diterima di muka	XXXX	XXXX
Utang jangka pendek	XXXX	XXXX
Total Liabilitas Jangka Pendek	XXXX	XXXX
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Utang jangka panjang	XXXX	XXXX
Liabilitas imbalan kerja	XXXX	XXXX
Total Liabilitas Jangka Panjang	XXXX	XXXX
Total Liabilitas	XXXX	XXXX
ASET NETO		
<i>Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya</i>		
Surplus akumulasian	XXXX	XXXX
Penghasilan komprehensif lain*)	XXXX	XXXX
<i>Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)</i>		
Total Aset Neto	XXXX	XXXX
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	XXXX	XXXX

Sumber: DE ISAK 35 IAI, tahun 2018

2.1.5.2 Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan penghasilan komprehensif memiliki tujuan untuk menunjukkan jumlah surplus (defisit) serta penghasilan komprehensif lain pada periode akuntansi tertentu. Laporan ini memuat informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang berimplikasi pada perubahan jumlah pendapatan, informasi mengenai aktivitas yang menambah beban entitas, serta penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program kerja. Sementara itu, penghasilan komprehensif disajikan tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan penghasilan dengan pembatasan

dari pemberi sumber daya. Berikut merupakan contoh format dari laporan penghasilan komprehensif.

Gambar 2. 3
Laporan Penghasilan Komprehensif A

ENTITAS XYZ		
Laporan Penghasilan Komprehensif		
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	XXXX	XXXX
Jasa layanan	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka pendek (catatan D)	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	XXXX	XXXX
Lain-lain	XXXX	XXXX
Total Pendapatan	XXXX	XXXX
<i>Beban</i>		
Gaji, upah	XXXX	XXXX
Jasa dan profesional	XXXX	XXXX
Administratif	XXXX	XXXX
Depresiasi	XXXX	XXXX
Bunga	XXXX	XXXX
Lain-lain	XXXX	XXXX
Total Beban (catatan E)	XXXX	XXXX
Kerugian akibat kebakaran	XXXX	XXXX
Total Beban	XXXX	XXXX
Surplus (Defisit)	XXXX	XXXX
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	XXXX	XXXX
Total Pendapatan	XXXX	XXXX
<i>Beban</i>		
Kerugian akibat kebakaran	XXXX	XXXX
Surplus (Defisit)	XXXX	XXXX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	XXXX	XXXX
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	XXXX	XXXX

Sumber: DE ISAK 35 IAI, tahun 2018

Gambar 2. 4
Laporan Penghasilan Komprehensif B

ENTITAS XYZ						
Laporan Penghasilan Komprehensif						
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2						
(dalam jutaan rupiah)						
	20X2			20X1		
	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Jumlah	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Jumlah
PENDAPATAN						
Sumbangan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Jasa layanan	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Penghasilan investasi jangka pendek (catatan D)	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Lain-lain	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Total Pendapatan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
BEBAN						
Gaji, upah	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Jasa dan profesional	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Administratif	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Depresiasi	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Bunga	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Lain-lain	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Total Beban (catatan E)	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Kerugian akibat kebakaran	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Total Beban	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Surplus (Defisit)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

Sumber: DE ISAK 35 IAI, tahun 2018

2.1.5.3 Laporan Perubahan Aset Neto

Laporan perubahan aset neto menyajikan informasi mengenai penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya. Dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35, laporan perubahan aset neto menyajikan informasi mengenai aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber

daya dan aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Berikut contoh laporan perubahan aset neto:

Gambar 2. 5
Laporan Perubahan Aset Neto

ENTITAS XYZ		
Laporan Perubahan Aset Neto		
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	XXXX	XXXX
Surplus tahun berjalan	XXXX	XXXX
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	XXXX	XXXX
Saldo akhir	XXXX	XXXX
Penghasilan Komprehensif Lain		
Saldo awal	XXXX	XXXX
Peghasilan komprehensif tahun berjalan****)	XXXX	XXXX
Saldo akhir	XXXX	XXXX
Total	XXXX	XXXX
ASET NETO DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	XXXX	XXXX
Surplus tahun berjalan	XXXX	XXXX
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	(XXXX)	(XXXX)
Saldo akhir	XXXX	XXXX
TOTAL ASET NETO	XXXX	XXXX

ⓑ
Ⓐ

Sumber: DE ISAK 35 IAI, tahun 2018

2.1.5.4 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan aktivitas penerimaan dan penggunaan kas pada satu periode akuntansi. Informasi dalam arus kas berguna dalam hal menilai kemampuan organisasi menghasilkan kas dan setara kas. Dalam laporan arus kas, penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasi dalam tiga aktivitas, yakni operasi, investasi, dan pendanaan. Adapun bentuk laporan arus kas yang disajikan dengan berdasarkan ISAK No. 35 adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 6
Laporan Arus Kas Metode Langsung

ENTITAS XYZ		
Laporan Arus Kas		
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
AKTIVITAS OPERASI		
Kas dari sumbangan	xxxx	xxxx
Kas dari pendapatan jasa	xxxx	xxxx
Bunga yang diterima	xxxx	xxxx
Penerimaan lain-lain	xxxx	xxxx
Bunga yang dibayarkan	xxxx	xxxx
Kas yang dibayarkan kepada karyawan	xxxx	xxxx
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
AKTIVITAS INVESTASI		
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	xxxx	xxxx
Pembelian peralatan	(xxxx)	(xxxx)
Penerimaan dari penjualan investasi	xxxx	xxxx
Pembelian investasi	(xxxx)	(xxxx)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</i>	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
AKTIVITAS PENDANAAN		
<i>Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk:</i>		
Investasi dalam dana abadi (<i>endowment</i>)	xxxx	xxxx
Investasi bangunan	xxxx	xxxx
	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<i>Aktivitas pendanaan lain:</i>		
Bunga dibatasi untuk reinvestasi	xxxx	xxxx
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(xxxx)	(xxxx)
	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>

Sumber: DE ISAK 35 IAI, tahun 2018

Gambar 2.7
Laporan Arus Kas Metode Tidak Langsung

ENTITAS XYZ		
Laporan Arus Kas		
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2		
<i>(dalam jutaan rupiah)</i>		
	20X2	20X1
AKTIVITAS OPERASI		
Rekonsiliasi surplus (defisit) menjadi kas neto dari aktivitas operasi:		
Surplus	XXXX	XXXX
Penyesuaian untuk:		
Depresiasi	XXXX	XXXX
Penurunan piutang bunga	XXXX	XXXX
Penurunan dalam utang jangka pendek	XXXX	XXXX
Penurunan dalam pendapatan diterima di muka	XXXX	XXXX
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
AKTIVITAS INVESTASI		
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	XXXX	XXXX
Pembelian peralatan	(XXXX)	(XXXX)
Penerimaan dari penjualan investasi	XXXX	XXXX
Pembelian investasi	(XXXX)	(XXXX)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</i>	<u>(XXXX)</u>	<u>(XXXX)</u>
AKTIVITAS PENDANAAN		
<i>Penerimaan dari sumbangan dibatasi untuk:</i>		
Investasi dalam dana abadi (<i>endowment</i>)	XXXX	XXXX
Investasi dalam bangunan	XXXX	XXXX
	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<i>Aktivitas pendanaan lain:</i>		
Bunga yang dibatasi untuk reinvestasi	XXXX	XXXX
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(XXXX)	(XXXX)
	<u>(XXXX)</u>	<u>(XXXX)</u>
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	<u>(XXXX)</u>	<u>(XXXX)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>

Sumber: DE ISAK 35 IAI, tahun 2018

2.1.5.5 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK mengungkapkan kebijakan-kebijakan yang digunakan sebagai acuan dari penyajian laporan keuangan. CaLK menyediakan informasi tambahan yang dianjurkan untuk diungkapkan oleh entitas yang berorientasi nonlaba.

Sehingga dari keempat laporan keuangan lainnya, CaLK menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penerapan ISAK No.35 pada organisasi keagamaan yang diteliti oleh Lasfita dan Muslimin (2020) memperoleh hasil bahwa, Masjid Al-Mabrur Sukolilo Surabaya masih mencatat dan mengelola keuangan secara sederhana. Pencatatan keuangan masjid ini mengacu pada laporan keuangan yang lazimnya disusun oleh masjid lain. Oleh sebab itu, sulit bagi pengurus untuk melakukan penilaian setiap kekayaan masjid. Penyajian laporan keuangan dengan ISAK 35 sebagai acuannya dapat memudahkan pembaca untuk memahami informasi akuntansi di dalamnya. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan nantinya diharapkan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan pengurus Masjid Al-Mabrur Sukolilo Surabaya.

Ula et al. (2021) meneliti penerapan ISAK 35 pada Masjid Baitul Hidayah Puger Jember diperoleh hasil jika Masjid Baitul Hidayah Puger Jember memperoleh penerimaan dari infaq jumat, infaq idul fitri, infaq idul adha, serta dari donator. Selanjutnya dana tersebut digunakan untuk pengeluaran rutin seperti biaya air dan listrik serta gaji pengurus kebersihan. Berdasarkan penerimaan dan pengeluaran tersebut bendahara masjid hanya mencatat keuangan secara sederhana. Untuk itu pengelolaan keuangan jauh dari pelaporan keuangan dengan standar akuntansi. Ketika telah menyusun laporan keuangan dengan standar ISAK 35, pengurus masjid dapat menunjukkan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Purba et al. (2022) tentang penerapan laporan keuangan entitas berorientasi pada nonlaba berdasarkan ISAK 35 memperoleh hasil bahwa Panti Asuhan Kasih Murni menggunakan laporan keuangan sederhana. Laporan keuangan tersebut hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran. Penyajian laporan keuangan pada organisasi ini belum sesuai dengan ISAK 35, karena Panti Asuhan Kasih Murni hanya menyajikan laporan hasil kegiatan, laporan bulanan dan laporan tahunan. Tentu laporan tersebut jauh dari kata sesuai dengan ISAK 35 yang mana terdiri dari laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aktiva bersih, laporan arus kas, neraca dan catatan atas laporan keuangan (CALK).

Damanik et al. (2022) menemukan dalam penelitiannya bahwa, Rumah Sakit X telah menyajikan 3 laporan keuangan sesuai ISAK 35. Adapun laporan yang telah sesuai yakni laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan CALK. Akan tetapi ketidaksesuaian ditemukan pada laporan perubahan aset neto yang belum disajikan dan laporan aktivitas yang semestinya menggunakan istilah laporan penghasilan komprehensif. Untuk itu pada laporan penghasilan komprehensif, pendapatan perlu disajikan terpisah ke dalam bentuk pendapatan tanpa adanya pembatasan dan pendapatan dengan adanya pembatasan penggunaan dari pemberi sumber daya.

Alveniawati et al. (2022) meneliti bagaimana implementasi ISAK 35 pada Yayasan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Madiun. Hasilnya adalah Yayasan IPHI Madiun belum menyajikan laporan keuangan menurut ISAK 35 yang disebabkan oleh belum adanya sosialisasi. Kondisi keuangan yang belum diungkapkan kepada donatur/pihak berkepentingan mencerminkan Yayasan IPHI Madiun belum akuntabel. Akan tetapi sebagai organisasi nirlaba yang dananya diperoleh dari donatur, penting untuk Yayasan IPHI Madiun menyusun laporan keuangan menurut ISAK 35 demi menjaga akuntabilitas dan transparansi kepada donatur.

Melia (2022) menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan pada organisasi nirlaba di Indonesia mengalami keterbatasan sumber daya dan pengetahuan akuntansi. Disamping itu, pengelola organisasi nirlaba memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas bagi pihak internal dan eksternal. Untuk itu diharapkan organisasi nirlaba menyusun laporan keuangan menggunakan standar ISAK 35. Hal ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas pada donatur/pihak yang berkepentingan.

2.3 Kerangka Pikir

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban entitas kepada pemakai informasi akuntansi. Sebagai sebuah organisasi, laporan pengelolaan keuangan menjadi cerminan bahwa organisasi tersebut telah transparan dan akuntabel dalam usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut, organisasi nirlaba

juga perlu mengelola keuangannya seperti organisasi yang berorientasi pada laba. Namun organisasi nirlaba seperti tempat ibadah mempunyai kecenderungan tidak terdapat kepemilikan organisasi yang mutlak. Sebagai tempat ibadah terbesar dan tertua di Malang, Vihara Dhammadipa Batu mengindikasikan umat yang beribadah cukup banyak. Banyaknya umat Buddha tentu berbanding lurus dengan umat yang menjadi donatur. Dana yang cukup banyak masuk dari donator perlu dikelola oleh pengurus vihara guna efektivitas pengeluaran baik pengeluaran operasional maupun non-operasional.

Vihara Dhammadipa tergolong mencatat pengelolaan keuangan secara sederhana, yaitu sebatas pemasukan dan pengeluaran. Dalam rangka memberikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada donatur akan lebih baik apabila vihara menyusun laporan keuangan. Vihara dapat menggunakan ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas berorientasi Non Laba sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan. Yang dimana salah satu manfaat penggunaan ISAK 35 adalah mengetahui bagaimana alur pengelolaan dana secara terperinci yang tercermin pada laporan arus kas. Nantinya pengurus vihara dapat menekan pengeluaran-pengeluaran agar lebih efektif. Sementara itu, laporan keuangan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan apabila terdapat indikasi penyelewengan dana.